

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Kajian Program Pesantren Mahasiswa**

Program Pesantren Mahasiswa (PPM) merupakan program pesantren mukim Selama periode empat tahun, tersedia program pesantren residensi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menempuh kuliah di STAI Daarut Tauhiid. Program Pesantren Mahasiswa (PPM) ini juga menggantungkan diri pada manajemen pengetahuan untuk menyederhanakan penyebaran informasi sehingga pengetahuan dapat diteruskan kepada para peserta dan menjadi bagian integral dari perbendaharaan pengetahuan organisasi.

Adapun tujuan dalam program ini diantaranya :

1. Menciptakan individu santri dengan keyakinan yang teguh, pelaksanaan ibadah yang tepat, karakter yang baik, dan pemahaman yang memadai terhadap prinsip-prinsip ilmu syariah yang esensial sebagai dasar utama dalam menjalani kehidupan.
2. Mengembangkan mahasiswa yang memiliki kemampuan yang holistik, termasuk kecerdasan intelektual (IQ), emosional (EQ), spiritual (SQ), dan sosial (ScQ).
3. Mendidik generasi muda/mahasiswa agar menjadi agen perubahan sekaligus menyiapkan individu yang berpotensi menjadi Da'i/ah Rabbani yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, termasuk keluarga, lingkungan kampus, dan masyarakat, dengan mempertimbangkan spesialisasi dan minat masing-masing individu.

Tujuan dari Program Pesantren Mahasiswa adalah untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan sikap tanggung jawab sosial, serta memiliki pemahaman mendalam terutama dalam ilmu agama dan wawasan Islam, serta mampu melakukan dakwah di berbagai situasi dan kondisi. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat.

Karena itulah, program ini tetap diterapkan di Daarut Tauhiid dan memiliki durasi empat tahun. Dalam kurun waktu ini, terdapat tahapan-tahapan yang harus dijalani, termasuk guru ngaji, seni, ivent, serta pengabdian kepada berbagai cabang DT Peduli. Proses PPM berlangsung di lingkungan pesantren atau internal terlebih dahulu, di mana PPM harus mengikuti sertifikasi sebelum melanjutkan ke tahap eksternal atau di cabang-cabang DT Peduli. Program PPM yang sedang berjalan ini dapat dianggap sebagai program kaderisasi.

## **B. Kajian *Civic Education***

### **1. Pengertian *Civic Education***

Menurut Sri Wuryan dalam buku Ilmu Kewarganegaraan (*Civics*) (2014, hlm. 1) Mengemukakan asal usul kata "*Civics*" secara etimologis berasal dari kata "*Civicus*" yang merujuk pada warga atau penduduk sebuah kota (polis). Istilah ini berkaitan erat dengan pelaksanaan demokrasi langsung dalam kehidupan masyarakat Athena, Yunani.

Pengertian "*Civics*" dalam terminologi memiliki beragam pandangan dari para pakar. Sebagaimana dikemukakan oleh Charter Van Good, "*civics*" adalah "unsur-unsur ilmu politik atau cabang ilmu politik yang membahas hak dan kewajiban warga negara". Pokok-pokok pengertian "*civics*" meliputi: (a) "*civics*" merupakan bagian dari ilmu politik, (b) juga dikenal sebagai Ilmu Kewarganegaraan (IKN), (c) fokus studi "*civics*" adalah individu-individu, (d) melibatkan peran serta warga negara atau hak dan kewajiban mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Pada masa kekaisaran Romawi, istilah "*Civics*" memiliki makna "kehormatan", yang tercermin dalam ungkapan "*Civics Romanus Sum*", yang berarti "Aku adalah warga negara Romawi". Penting untuk dicatat bahwa pemahaman mengapa "*civics*" diartikan sebagai "kehormatan" berhubungan dengan partisipasi orang dalam pemerintahan Romawi pada waktu itu. Tidak semua orang dapat ikut

serta dalam pemerintahan itu, kecuali mereka atau warga negara yang dalam dirinya melekat hak-hak istimewa, sebagai berikut:

1. Yang ikut rapat hanya penduduk yang berstatus warga negara (*citizens*).
2. Sedangkan yang dimaksud dengan *citizens* tersebut adalah pria yang berusia 18 tahun, sementara itu wanita hak politiknya tidak diakui dalam menentukan kebijakan pemerintahan di negara kota.
3. teritorial atau luas wilayah negara kota tersebut hanya seluas wilayah "kota", dimana penduduknya relatif sedikit, sedangkan sepertiga jumlah penduduknya adalah budak.

Di samping itu, A.S. Hornby menyampaikan pandangannya tentang arti "*civics*" sebagai "kajian tentang pemerintahan dan tugas-tugas warga negara yang berhubungan dengan sebuah kota atau warga negara." "*Civics*" adalah pelajaran mengenai tata pemerintahan dan tanggung jawab-tanggung jawab warga negara yang berhubungan dengan negara atau antar warga negara. Konsep ini menyoroti esensi pelajaran "*civics*," yang tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan, tetapi juga melibatkan tugas-tugas yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh warga negara.

Definisi lain tentang "*civics*" diberikan oleh Edmonson, yaitu bahwa "*Civics* biasanya didefinisikan sebagai studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan—yakni, tugas-tugas, hak, dan hak istimewa warga negara." Berdasarkan pengertian ini, "*civics*" melibatkan pelajaran atau analisis tentang pemerintahan dan status kewarganegaraan, termasuk mengulas kewajiban dan hak-hak khusus yang dimiliki oleh warga negara.

Lebih lanjut, dalam ensiklopedia "Populer Politik Pembangunan Pancasila," disampaikan bahwa "ilmu kewarganegaraan negara" mengacu pada kajian mengenai warga negara dalam suatu negara tertentu, yang dilihat dari perspektif hukum dan tata negara.

Menurut Zamroni (2018, hlm. 15) mengemukakan bahwa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan Pendidikan yang

memiliki fokus pada demokrasi, bertujuan untuk mempersiapkan anggota masyarakat agar memiliki kemampuan berpikir kritis dan bertindak secara demokratis. Melalui aktivitas ini, kesadaran tentang fakta bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang memberikan jaminan atas hak-hak individu ditanamkan kepada generasi baru. Penting untuk diingat bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang dapat dicontoh begitu saja dari masyarakat lain, melainkan merupakan suatu proses pembelajaran. Keberlanjutan demokrasi bergantung pada kemampuan untuk mengubah nilai-nilai demokrasi. Daryono menjelaskan bahwa Kewarganegaraan mencakup hak dan tanggung jawab warga negara, merupakan keanggotaan seseorang dalam unit politik tertentu, khususnya negara, yang memberikan hak untuk terlibat dalam aktivitas politik. Seseorang yang memiliki keanggotaan semacam ini disebut warga negara. Pandangan Wolhoff menyatakan bahwa Kewarganegaraan adalah kepribadian anggota suatu bangsa tertentu, yang terhubung dengan yang lain melalui persamaan bahasa, kehidupan sosial-budaya, dan kesadaran nasional. Menurut Laros Tuhuteru (2022, hlm. 7) mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memberdayakan individu agar dapat membuat keputusan yang bijak dari berbagai opsi yang ada, dengan memberikan pengalaman dan pemahaman yang membantu mengembangkan komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip yang memperkuat masyarakat bebas. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya meningkatkan partisipasi warga negara, tetapi juga menanamkan partisipasi yang kompeten dan bertanggung jawab, dan kompetensi tersebut harus didasarkan pada refleksi yang mendalam.

Menurut Sriwuryan (2014, hlm. 77) yaitu Sama halnya dengan pelajaran Ilmu Kewarganegaraan maupun pendidikan kewarganegaraan, tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang berkualitas, yaitu individu yang memiliki sifat baik, kreativitas, tanggung jawab, kecerdasan, kritis, dan partisipatif. Warga negara yang memiliki tanggung jawab (*civic responsibility*) berarti mereka memiliki

kewajiban terhadap diri sendiri, Tuhan, sesama manusia, lingkungan alam, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, warga negara yang partisipatif adalah mereka yang dengan sadar mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, mengingat bahwa kemampuan untuk mengambil keputusan merupakan salah satu kompetensi dasar warga negara. Selain itu, kompetensi dasar lainnya mencakup penguasaan informasi, komunikasi, kerja sama, ketertiban, serta kemampuan untuk menjalankan berbagai kepentingan dengan tepat.

Ahmad Sanusi berpendapat bahwa jika civics dilihat sebagai disiplin dalam ilmu politik, maka fokusnya berkaitan dengan peran serta posisi warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh konstitusi negara terkait. Hal-hal penting yang perlu dicermati dari pendapat Sanusi yaitu :

- a. Pendekatan dalam studi civics tidak berfokus pada negara sebagai entitas besar, melainkan difokuskan pada individu-individu warga negara sebagai elemen yang lebih kecil.
- b. Sebagai elemen lebih kecil, ini mencakup: perilaku, potensi, kesadaran, usaha dan aktivitas, serta pencapaian dalam kehidupannya.
- c. Penelitian civics mendapatkan kontribusi dari berbagai bidang ilmu lainnya, sehingga hubungan antara disiplin ini sangat erat dan mendorong kemajuan studi civics. *Civics* menekankan kebenaran yang bersifat logis dan berdasarkan fakta, oleh karena itu, konstitusi menjadi kerangka acuan yang paling objektif dalam lingkup kajian *civics*.

Menurut Sriwuryan (2014, hlm. 9) Pendidikan Pancasila menekankan pada aspek moral, diharapkan dapat terefleksi dalam tindakan sehari-hari yang mencerminkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kerangka masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok agama. Tujuan lainnya adalah menumbuhkan perilaku yang manusiawi yang adil dan beradab, mendukung persatuan dalam masyarakat yang memiliki beragam budaya dan kepentingan, serta

mendorong sikap yang mendukung demokrasi dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok, sehingga perbedaan pandangan dapat diatasi melalui musyawarah dan mufakat. Pendidikan agama memiliki tujuan untuk memperkuat iman dan taqwa sesuai dengan keyakinan peserta didik, sambil tetap menjunjung tinggi penghargaan terhadap agama lain dalam upaya menjaga kerukunan antarumat beragama dan memperkuat persatuan nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam memberikan edukasi peserta didik dengan pengetahuan dan kompetensi mendasar mengenai interaksi antara warga negara dan negara, sambil juga memberikan unsur-unsur dasar pendidikan pertahanan negara untuk membentuk warga negara yang dapat diandalkan bagi bangsa.. Di lingkungan Perguruan Tinggi, pendidikan bela negara diwujudkan melalui pendidikan kewirausahaan. Pada tahun 1994, mata pelajaran PMP berubah menjadi mata pelajaran PPKn dengan misi untuk mendidik mengenai nilai-nilai moral Pancasila, kewarganegaraan, hukum, dan tata masyarakat sebagai pendidikan politik.

Ciri khas PPKn adalah menciptakan individu yang berakhlak Pancasila, beriman dan bertakwa, memahami hak dan kewajiban serta menjalankannya dengan kesadaran dan tanggung jawab. Menurut Exposito (2019, hlm. 402) menunjukkan bahwa karakteristik identitas kemanusiaan Indonesia telah lama diakui baik sebagai individu maupun kolektivitas yang menghargai perbedaan dan memiliki nilai-nilai luhur, bermoral, dan religius. Ideologi negara dirumuskan oleh para pendiri untuk menjadi pedoman bagi generasi mendatang dan membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Ini juga mencakup partisipasi warga, termasuk partisipasi dalam kehidupan politik. Menurut Muchtar (2019, hlm. 402) memanfaatkan pendidikan Pancasila sebagai dasar Pendidikan Kewarganegaraan harus tetap dilanjutkan, mengoptimalkan nilainya sebagai sumber daya dan pondasi sosial-budaya untuk pendidikan demokrasi berbasis Pancasila. Menurut Peters (2019, hlm.

402) Inti pokok dari demokrasi langsung terletak pada pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam ranah politik. Menurut Simunjak (2019, hlm. 403) pendidikan Kewarganegaraan yang didasarkan pada Pancasila seharusnya terus dianggap sebagai modal dan aset budaya sosial dalam pendidikan demokrasi Pancasila. Menurut Peters (2019, hlm. 402) menyatakan bahwa esensi utama dalam demokrasi langsung adalah pemahaman akan hak dan kewajiban dalam politik.

Menurut Simunjak (2019, hlm. 403) menjelaskan bahwa setiap negara memiliki variasi dalam nama dan penekanan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang dipengaruhi oleh karakteristik dan sistem politik serta budaya politik diadopsi oleh negara tersebut. Sebagai contoh, di Cina, pendidikan moral menjadi fokus dalam Pendidikan mengenai kewarganegaraan di lingkungan sekolah. Aspek politik yang dominan mempengaruhi model pendidikan kewarganegaraan di Cina, yang sejalan dengan kebutuhan politik otoriter Cina yang dikuasai oleh Partai Komunis China. Di Eropa, fokusnya lebih kepada politisi.

Hal menarik adalah meskipun pendidikan sipil secara formal diajarkan sebagai bagian dari pendidikan moral di sekolah-sekolah, partai dan organisasi pemuda di Cina berhasil membangun situs-situs kewarganegaraan besar-besaran. Kalidjernih (2019, hlm. 403) mengamati bahwa di Orde Baru, pendidikan kewarganegaraan beriringan dengan pendidikan moral yang diartikan oleh rezim sebagai interpretasi Pancasila sebagai ideologi negara. Di Cina, selain memperkuat status quo pemerintah, juga ditanamkan ideologi Marxisme-Leninisme, Ajaran Mao Zedong, dan Teori Xi Jinping.

Menurut Sapriya (2003, hlm. 2) menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Paradigma yang Diperbaharui memiliki tiga misi utama: mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan, memajukan tanggung jawab kewarganegaraan, dan mendorong partisipasi warga. Oleh karena itu, pendidikan ini harus diimplementasikan dengan baik dalam pembelajaran Pancasila dan

pendidikan kewarganegaraan untuk mendorong partisipasi masyarakat di lingkungan mereka dan berkontribusi pada perbaikan sosial.

Menurut Djahin (1985, hlm. 21) mencatat bahwa siswa hidup dalam dunia nyata sekitar mereka secara sosiologis dan harus berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Sedangkan menurut Winataputra (2001, hlm. 4) mengamati bahwa “pendidikan kewarganegaraan” lebih luas, mencakup seluruh program pendidikan di sekolah, dengan mata pelajaran “civics” sebagai komponen utama dalam usaha membentuk warga negara yang baik. Sesuai dengan pendapat Kerr (2012, hlm. 4) bahwa *“Kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan diartikan secara luas untuk mencakup persiapan generasi muda dalam peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, dan khususnya peran pendidikan (melalui sekolah, pengajaran, dan pembelajaran) dalam proses persiapan tersebut.”* Maknanya, Secara keseluruhan, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan melibatkan langkah-langkah untuk membekali generasi muda dengan kemampuan untuk mengemban peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Fokus utamanya adalah peran pendidikan dalam segala aspek, baik dalam mengajar maupun proses pembelajaran, yang bertujuan untuk mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang kompeten.

Seperti dikemukakan Nu'man Somantri (2001, hlm. 275), bahwa *Civics* pada awalnya melibatkan konten ilmu politik, khususnya segmen yang terkait dengan demokrasi politik., yang secara terperinci demokrasi politik tersebut meliputi hal-hal yaitu:

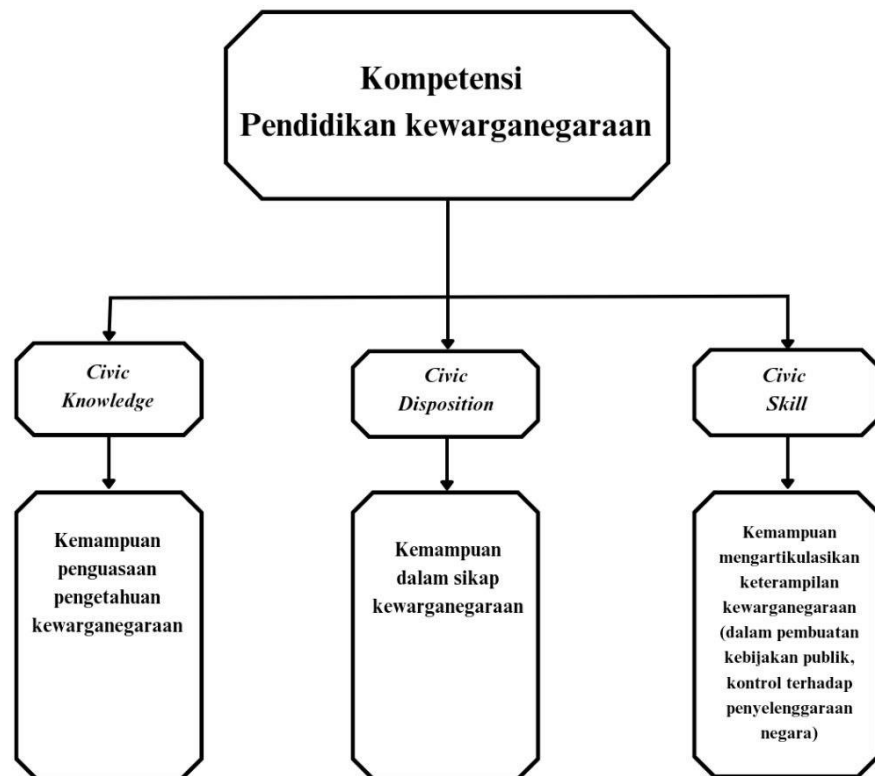
1. Konsep demokrasi meliputi teori-teori tentang demokrasi politik, teori mayoritas, hak-hak kelompok minoritas, konsep demokrasi dalam masyarakat, teori demokrasi berorientasi pemerintahan, dan persyaratan untuk tata pemerintahan yang demokratis.
2. Konstitusi Negara: konteks sejarah status hukum, isu-isu penting dalam konstitusi negara, identitas, integrasi, penetrasi, partisipasi, dan alokasi kekuasaan.



3. Input dalam sistem politik: meliputi interpretasi sentimen publik mengenai politik, pengamatan terhadap perilaku politik (pengaruh status sosial, lingkungan domestik, kelompok etnis, komunikasi, pengaruh keluarga, persahabatan, dan rekan kerja).
4. Partai Politik dan Kelompok Advokasi: Melibatkan aspek-aspek sistem partai, peran partai politik, fungsi kelompok advokasi, dan pentingnya hubungan masyarakat.
5. Pemilihan Umum: Tujuan mendasar dari pemilihan, struktur sistem pemilihan, dan peran pemilihan dalam konteks distribusi kekuasaan.
6. Institusi Pengambil Keputusan: Interaksi antara pembuat undang-undang dan kepentingan masyarakat, proses legislasi, dan peran legislatif presiden.
7. Presiden sebagai Kepala Negara dan Administrasi: Posisi presiden yang sejalan dengan konstitusi, pengawasan legislatif terhadap presiden, sistem dan mekanisme pemerintahan, serta organisasi dan manajemen administrasi pusat dan daerah.
8. Lembaga Peradilan: Termasuk sistem peradilan dan administrasi keadilan, hak dan status individu dalam proses pengadilan, proses pengadilan, serta hubungan di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
9. Hasil dari Sistem Demokrasi Politik: Termasuk hak dan kebebasan individu yang dijamin dalam konstitusi, kebebasan berbicara, kebebasan pers dan media massa, otonomi akademik, perlindungan yang setara bagi warga negara, serta metode perolehan atau kehilangan kewarganegaraan.
10. Kesejahteraan umum dan pertahanan negara: tugas negara dan warga negara dalam mencapai kemerdekaan umum, hak-hak memiliki barang atau kekayaan, politik pajak untuk kesejahteraan umum, politik luar negeri dan keselamatan nasional, hubungan internasional.
11. Perubahan Sosial dan Demokrasi Politik: Demokrasi politik dalam era perkembangan saat ini, struktur keluarga, agama, pendidikan, dan hubungan mereka dengan demokrasi politik.

Dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, seperti yang dicatat oleh Susanto (2014, hlm. 17), prinsip-prinsip etika yang ditekankan dalam kompetensi materi kewarganegaraan meliputi pemahaman tentang kewarganegaraan (Pengetahuan Kewarganegaraan), pembinaan keterampilan kewarganegaraan (Keterampilan Kewarganegaraan), dan penanaman sikap kewarganegaraan (Sikap Kewarganegaraan). Tujuan akhirnya adalah membentuk karakter individu sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Individu yang dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan akan berkembang menjadi peserta yang percaya diri.

## 2. Pembagian *Civic Education*



*Bagan 2.1 pembagian civic education*

**a. *Civic Knowledge***

Menurut Sunarso (2009, hlm. 71), *civic knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan adalah hal material yang perlu diketahui pada intinya, warga negara memerlukan informasi penting yang pada dasarnya mencakup hak dan kewajiban mereka, pemahaman tentang kerangka kerja dan sistem politik, struktur pemerintahan, serta prinsip-prinsip universal yang mengatur masyarakat demokratis. Ini juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana berkolaborasi untuk kemajuan bersama dan kehidupan berdampingan yang harmonis dengan masyarakat global. Dalam konteks ini, pengetahuan kewarganegaraan pada dasarnya adalah pengetahuan mendasar yang harus dimiliki setiap warga negara.

Menurut Raharja (2017, hlm. 203-204), pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) adalah hal pengetahuan yang perlu dimiliki oleh warga negara meliputi hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Pemahaman mendasar ini meluas hingga ke konfigurasi sistem politik dan pemerintahan, pengaturan sosial yang diinginkan, prinsip-prinsip universal dalam masyarakat demokratis, dan metode kolaboratif untuk menerapkannya guna kemajuan kolektif dan kehidupan berdampingan yang harmonis dalam masyarakat global..

Menurut Denny Setiawan (2015, hlm. 64), Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) mengacu pada topik-topik yang perlu diketahui oleh Aspek pengetahuan tercermin melalui pemahaman tentang kerangka dasar sistem sosial, politik, negara, dan pemerintahan. Setiap individu memiliki kesempatan untuk menyelami aspek manajemen dan masyarakat sipil. Materi ini membantu siswa dalam melakukan refleksi luas dan analisis logis tentang hakikat eksistensi sosial, dinamika politik, dan keperluan tata pemerintahan. Ini mengeksplorasi alasan di balik kebutuhan akan politik dan pemerintahan, tujuan pemerintahan, sifat-sifat

penting pemerintahan (terbatas dan tidak terbatas), serta sifat dari maksud dan tujuan konstitusi; dan bentuk-bentuk alternatif organisasi pemerintahan. Dalam perkembangan selanjutnya, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran baru menggantikan Permendiknas Tahun 2004 tentang Kewarganegaraan No. 22 Tahun 2006, menunjukkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan diterjemahkan dan mencakup semua pengetahuan yang terkait dengan delapan bidang studi, ini meliputi kesatuan dan persatuan negara, norma-norma, hukum, hak asasi manusia, keperluan rakyat, konstitusi, kekuasaan, dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Berpikir kritis pada dasarnya merupakan pengembangan dari unsur-unsur berpikir berdasarkan logika dan bukti empiris berdasarkan pengetahuan ilmiah. Berpikir kritis bersifat anti-dogmatis dan anti-propaganda, serta bertentangan dengan pemikiran tradisional.

Melalui berpikir kritis seseorang dapat menemukan kebenaran secara objektif, berani mengkritisi berbagai penyimpangan sosial, mampu menggali kelemahan-kelemahan lain sebagai bahan informasi bagi tindakan dan perilaku yang rasional. Berpikir kritis merupakan reaksi terhadap pemikiran tradisional, yang cenderung menyembunyikan realitas hanya untuk mendukung status quo dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Memang pembelajaran sebagai wahana berpikir kritis sudah menjadi tradisi dalam ilmu-ilmu sosial dengan pendidikan kewarganegaraan sebagai intinya, yaitu tradisi “inkuiri reflektif”. Melalui tradisi ini, pembelajaran yang sebenarnya berpusat pada siswa, karena siswa belajar melakukan aktivitasnya sendiri: menganalisis, mempelajari, kemudian berargumentasi, berdiskusi dan membuat evaluasi akademik materi ilmu sosial, peran guru adalah memfasilitasi pembelajaran. Prosedur. Dengan demikian, *community college* yang ideal menekankan pendekatan yang berpusat pada siswa.

Menurut Winataputra dan Dasim (2012, hlm. 199) Untuk mencapai pemahaman mengenai aspek pengetahuan kewarganegaraan, disajikan seperangkat lima pertanyaan. Kelima pertanyaan ini terdiri dari: (1) Apa yang membentuk ranah kewarganegaraan, politik, dan tata pemerintahan; (2) Apa prinsip-prinsip dasar sistem politik di Indonesia; (3) Bagaimana sebuah pemerintahan yang didirikan melalui konstitusi mencerminkan aspirasi, nilai, dan prinsip demokrasi Indonesia; (4) Bagaimana interaksi global Indonesia dengan negara-negara lain membentuk; dan (5) Peran apa yang dimainkan oleh warga dalam kerangka demokrasi Indonesia. Pertanyaan awal mengenai "apa yang meliputi hakikat kewarganegaraan, politik, dan tata pemerintahan?" bertujuan untuk membimbing warga dalam merenungkan dengan pengetahuan tentang hakikat negara sehubungan dengan aspek kewarganegaraan, politik, dan tata pemerintahan. Pertanyaan kedua, "Apa dasar-dasar sistem politik Indonesia?" dalam pertanyaan ini dapat memberikan pemahaman tentang landasan sejarah dan filsafat dari susunan politik Indonesia. Pertanyaan ketiga menggali "bagaimana sebuah pemerintahan yang didirikan atas dasar prinsip-prinsip konstitusi mencerminkan tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia?" Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini membantu warga negara memahami dan mengevaluasi struktur pemerintahan yang terbatas yang ada serta cara alokasi kekuasaan.

Pertanyaan keempat berkaitan dengan "bagaimana Indonesia berinteraksi dengan negara-negara lain secara global dan posisi apa yang diambil dalam isu-isu global?" Pertanyaan ini memiliki arti penting, karena Indonesia adalah bagian penting dalam kancah global, dan warga harus memahami aspek-aspek krusial dari hubungan internasional dan tantangan global yang memengaruhi kehidupan mereka. Pertanyaan kelima mengangkat "peran apa yang dimainkan oleh warga dalam demokrasi Indonesia?" Melalui pertanyaan ini, warga seharusnya paham bahwa dengan

berpartisipasi aktif dalam urusan negara, mereka dapat berkontribusi pada peningkatan standar kehidupan di komunitas lokal mereka, dan dampak ini dapat meluas hingga ke seluruh bangsa.

Dari hasil paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) adalah Informasi yang seharusnya dimiliki oleh warga mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai anggota suatu negara adalah sangat penting dalam membentuk kerangka sistem politik dan pemerintahan, serta mendirikan harmoni sosial yang ideal dalam konteks sosial dan nasional. Selain itu, pengetahuan ini mencakup prinsip-prinsip universal dalam masyarakat demokratis, seiring dengan strategi-strategi untuk upaya kolaboratif dalam mencapai kemajuan kolektif serta membina kehidupan bersama yang harmonis dalam skala global.

**b. Civic Skills**

Menurut Burhan (2016, hlm. 8), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) adalah keterampilan kewarganegaraan, partisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Sunarso (2009, hlm. 71), Kapabilitaskewarganegaraan berkembang dari pengetahuan kewarganegaraan, menghasilkan pemerolehan pengetahuan. sebelumnya menjadi sesuatu yang bermakna, sedangkan keterampilan kewarganegaraan mencakup keterampilan intelektual (*intellectual skill*) dan keterampilan partisipatif (*participation skill*). Menurut Raharja (2017, hlm. 204) *Civic Skill* adalah pengembangan pengetahuan warga negara sedemikian rupa sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang berguna karena dapat berguna untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut *Branson* dalam buku Winarno (2014, hlm. 170), Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*) adalah keterampilan yang berkembang dari Pengetahuan Kewarganegaraan, sehingga pengetahuan merupakan ulat dan mereka tidak hanya perlu

menguasai pengetahuan dasar yang tampak pada kelima soal tersebut. seperti dijelaskan di atas, tetapi harus memiliki keterampilan intelektual dan partisipatif yang relevan.” Keterampilan intelektual yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang terinformasi, efektif, dan bertanggung jawab disebut berpikir kritis. Standar Nasional untuk Kewarganegaraan dan Administrasi dan Penilaian Kemajuan Pendidikan Nasional (NAEP) tahun 1998 memberikan klasifikasi, yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan keterampilan (*identifying and describing*), kemudian menjelaskan, menganalisis dan mengevaluasi (*explaining, analysing, and evaluating*) dan mengambil serta mempertahankan posisi dalam urusan publik (*defending positions on public issue*). Pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi atau memberi makna pada sesuatu yang nyata, seperti bendera, simbol nasional, lagu kebangsaan, monumen nasional, atau peristiwa politik dan administratif seperti Hari Kemerdekaan. Pendidikan kewarganegaraan juga memberikan kesempatan untuk memahami atau memberi makna pada sesuatu yang tidak berwujud, seperti cita-cita nasional, aspirasi dan tujuan bernegara, hak mayoritas dan minoritas, masyarakat sipil dan konstitusionalisme. Mengenali tanda-tanda bahasa dan emosi juga sangat penting bagi seorang warga negara. Anda harus memahami dengan jelas arti sebenarnya dari bahasa dan simbol emosional yang digunakan. Keterampilan intelektual lain yang dipromosikan oleh pendidikan kewarganegaraan berkualitas tinggi adalah keterampilan deskriptif. Kemampuan untuk menggambarkan fungsi dan proses seperti checks and balances atau pengawasan hukum menunjukkan pemahaman. Tren yang jelas dan membatasi, seperti partisipasi dalam kehidupan sipil, imigrasi atau kehidupan kerja, selalu membantu warga beradaptasi dengan peristiwa jangka panjang.

Menurut Winarno (2014, hlm. 172) Orientasi pendidikan kewarganegaraan terhadap pemahaman pendidikan kewarganegaraan juga telah berubah bahkan hanya sebatas mengajarkan pentingnya kewarganegaraan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan subbagian keterampilan kognitif/intelektual kewarganegaraan, orientasi terhadap pengetahuan kewarganegaraan harus tetap dilanjutkan, karena siswa pada prinsipnya tidak lepas dari pengetahuan kewarganegaraan. Diharapkan dalam pengembangan subbidang kognitif kewarganegaraan, pemahaman kewarganegaraan akan dimasukkan ke dalam pemahaman kewarganegaraan, namun jika yang diajarkan hanya kewarganegaraan maka kewarganegaraan tidak termasuk dalam kognitif. Contoh sederhananya, jika guru PKn ingin mengajarkan cara mempengaruhi kebijakan publik, maka siswa harus memahami konsep kebijakan publik terlebih dahulu. Namun jika guru hanya memberikan wawasan dan pemahaman tentang apa itu kebijakan publik, maka siswa belum tentu memiliki keterampilan intelektual kewarganegaraan.

Menurut Winarno (2015, hlm. 175) Jika dibandingkan dengan dimensi keterampilan kewarganegaraan dengan taksonomi pembelajaran Benjamin S Bloom, maka cocok dengan aspek psikomotoriknya. Meski sejajar, namun tetap harus dipisahkan. Dalam Taksonomi Bloom, ranah psikomotor mewakili hasil belajar yang dicapai melalui keterampilan memanipulasi otot dan kekuatan fisik. Meskipun civic skill bukanlah keterampilan kekuatan fisik, melainkan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Menurut pendapat Winataputra dan Dasim (2012, hlm. 208) Keterampilan intelektual meliputi mengenali dan menggambarkan; menjelaskan dan menganalisis; serta menilai, mengadopsi, dan mempertahankan posisi terkait isu-isu publik. Di sisi lain, keterampilan partisipatif melibatkan berinteraksi, mengawasi, dan



berpengaruh. Kemampuan-kemampuan ini secara bersama-sama membentuk keterampilan kewarganegaraan diuraikan merupakan hal-hal yang harus dimiliki warga negara. Agar warga negara dapat menggunakan hak dan kewajibannya dengan baik. Selain itu, civic skill terlihat ketika warga negara menyelesaikan permasalahan dalam berbangsa dan bernegara. Cogan (dalam Hakim et al 2016, hlm. 10) berpendapat bahwa untuk menggambarkan warga negara yang baik harus memiliki Kemampuan untuk (1) mengatasi kompleksitas global; (2) bekerja sama dengan sesama individu; (3) merangkul dan mengakomodasi keragaman budaya; (4) terlibat dalam pemikiran analitis dan sistematis; (5) meredakan konflik tanpa menggunakan kekerasan; (6) mengubah perilaku konsumen untuk melindungi lingkungan; (7) menunjukkan kesadaran akan hak asasi manusia; (8) berpartisipasi dalam tata kelola regional, nasional, dan global. Beberapa pernyataan yang disebutkan terutama berkaitan dengan keterampilan kewarganegaraan, termasuk keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Keterampilan intelektual merupakan keterampilan berpikir kritis yang mencakup kemampuan mengenali, menggambarkan/memperinci, mengkaji, menilai, memastikan, dan membela posisi terhadap isu-isu publik. Namun, keterampilan partisipasi meliputi keterampilan komunikasi, keterampilan pemantauan dan mempengaruhi. Dengan keterampilan tersebut, warga negara dapat mendukung warga negara untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai aturan negaranya.

Dari hasil paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Civic Skill* adalah mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan sedemikian rupa oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh berubah menjadi aset berharga, karena dapat diterapkan dalam mengatasi tantangan-tantangan di dalam negeri dan negara. Kemampuan-kemampuan ini mencakup kecakapan intelektual dan kemampuan partisipatif.

c. *Civic Disposition*

Menurut Raharja (2017, hlm. 204) *Civic disposition* atau watak Kewarganegaraan adalah Kewarganegaraan dikembangkan secara perlahan berdasarkan pengalaman di lingkungan sekolah, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil. Malatuny (2017, hlm. 61) berpendapat bahwa kewarganegaraan Konsep pendidikan kewarganegaraan berhubungan dengan atribut esensial dan dedikasi yang diperlukan untuk mempertahankan dan mendorong prinsip-prinsip kewarganegaraan dan tata pemerintahan. Menurut Malatuny (2017, hlm. 66), Civic Disposition memiliki arti penting dalam membentuk prestasi akademis warga negara. Ia berpendapat bahwa keterampilan kewarganegaraan merupakan komponen integral dari pendidikan kewarganegaraan, yang tercermin dalam karakter kewarganegaraan dan tanggung jawab yang penting untuk pelaksanaannya. Budaya dan pengembangan disposisi ini dapat dicapai secara optimal melalui pengajaran pendidikan kewarganegaraan di semua tingkat pendidikan.

Menurut Winarno (2015, hlm. 194) sikap kewarganegaraan, sebagai unsur utama ketiga dalam pendidikan kewarganegaraan, meliputi dimensi publik dan pribadi yang penting untuk menjaga serta mengembangkan demokrasi konstitusional. Atribut kewarganegaraan, yang dipandang sebagai keterampilan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan melalui pengaruh pelajaran dan pengalaman di dalam lingkungan rumah, lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah. Pengalaman-pengalaman semacam ini seharusnya membentuk pemahaman bahwa demokrasi memerlukan pemerintahan yang mandiri dan bertanggung jawab kepada semua pihak.

Menurut Budi Mulyono (2017, hlm 220) arah dari disposisi kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan atribut penting baik pada tingkat kewarganegaraan maupun pribadi, termasuk akuntabilitas moral, pengendalian diri, dan menghargai nilai

intrinsik setiap individu. Demikian pula, tujuannya adalah untuk mengembangkan kualitas yang terkait dengan dinamika sosial, seperti keterlibatan kewarganegaraan, karakter yang baik, ketaatan pada hukum, pemikiran kritis, dan kesiapan untuk terlibat dalam mendengarkan aktif, negosiasi, dan kompromi. Atribut seperti akuntabilitas moral, pengendalian diri, dan penghargaan terhadap martabat individu sangat penting, sementara atribut dinamika komunitas memiliki tingkat penting yang lebih rendah. Prioritas seperti kesejahteraan warga, kesopanan, kepatuhan terhadap hukum, pemikiran kritis, dan kemampuan untuk terlibat dalam komunikasi konstruktif dan pembentukan konsensus adalah komponen vital dari demokrasi yang berkembang.

Menurut Popham (1995) dalam buku Winarno (2015, hlm. 194) Ranah afektif menentukan keberhasilan belajar. Sulit bagi orang diharapkan bahwa meskipun tidak memiliki minat pada mata pelajaran tertentu, peserta didik tetap dapat mencapai hasil belajar yang optimal dalam ranah prestasi akademik semua peminat mata pelajaran tersebut. Oleh karena itu, penting bagi semua pendidik untuk secara efektif merangsang keterlibatan setiap siswa guna mencapai kompetensi yang ditentukan, hubungan emosional seringkali diperlukan untuk menciptakan rasa memiliki, semangat persatuan, nasionalisme, rasa kebersamaan, dan lain-lain.

Menurut Nur Kholis (2020, hlm. 451-470) Sebagai pemimpin tim, Kepala Sekolah harus menginspirasi, memberi motivasi, mengarahkan dan mengarahkan dinamika tim inti agar setiap bagian dalam institusi mempunyai visi dan/atau pandangan yang sama. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, guru harus memperhatikan karakteristik afektif siswa ketika merencanakan program pembelajaran dan kegiatan belajar siswa.

Menurut Winataputra dan Dasim (2012, hlm. 205-206) Memahami bahwa hakikat kewarganegaraan melibatkan aspek publik dan pribadi, keduanya memiliki signifikansi mendalam dalam

membentuk demokrasi konstitusional suatu negara. Contoh dari atribut pribadi mencakup kualitas seperti akuntabilitas, kendali diri, dan menghargai martabat inheren setiap individu. Pada saat yang sama, esensi sosial yang ditandai dengan perhatian terhadap warga negara, kesopanan, ketaatan terhadap norma yang berlaku, pemikiran kritis, dan kemampuan untuk mendengarkan, bernegosiasi, dan mencari titik temu bersama adalah sifat-sifat penting bagi demokrasi yang berfungsi. Selanjutnya, berikan uraian ringkas mengenai atribut-atribut publik dan pribadi sebagai berikut:

- a. Menjadi anggota mandiri dalam masyarakat. Ciri ini mencakup rasa tanggung jawab yang timbul secara intrinsik berdasarkan kemauan pribadi daripada tekanan eksternal, mengambil tanggung jawab atas hasil dan pilihan yang diambil, dan mematuhi komitmen moral dan hukum sebagai komponen integral dari komunitas demokratis. Oleh karena itu, individu diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang keyakinan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan serta akibat yang timbul, bahkan dalam ketiadaan pengawasan eksternal.
- b. Melaksanakan kewajiban warga pribadi dalam bidang ekonomi dan politik. Kewajiban-kewajiban ini mencakup kemandirian, membimbing dan mendidik anggota keluarga, serta terlibat dalam kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam kegiatan komunal.
- c. Memerlihatkan penghormatan terhadap nilai intrinsik setiap individu. Menghargai nilai orang lain melibatkan mempertimbangkan dengan seksama sudut pandang yang beragam, bersikap sopan, menghormati kepentingan dan hak-hak sesama warga, serta mematuhi regulasi yang dibuat melalui konsensus kolektif.
- d. Terlibat secara efektif dan bijaksana dalam masalah sosial. Seseorang harus menerapkan kebijaksanaan dalam berpartisipasi dalam urusan sipil. Dimana hikmah tersebut dapat dirasakan

ketika seseorang mengikuti berbagai persoalan kewarganegaraan untuk memilih salah satu yang tertentu. serta menjadi seorang pemimpin. Serta mengetahui kapan saatnya mengesampingkan kepentingan pribadi warga negara dan kapan saatnya melepaskan tuntutan sipil dalam memenuhi tugas-tugas sipil.

Dari hasil paparan diatas, dapat disimpulkan Civic Disposition merujuk pada sifat atau karakter serta komitmen yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kewarganegaraan dan pemerintahan. Ini merupakan komponen penting dari pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk memajukan kewarganegaraan dan pemerintahan. Aspek ini dapat dikembangkan sebanyak mungkin melalui inklusi pendidikan kewarganegaraan di semua tingkat pendidikan.

### **C. Kajian *Civic Responsibility***

Menurut Rusnaini (2018, hlm. 5) *Civic responsibility* adalah pemahaman terhadap hak dan tugas yang dimiliki oleh warga negara yang memiliki tanggung jawab, dimana tanggung jawab sipil itu sendiri merupakan ciri kepribadian positif yang menjadi landasan pemikiran masyarakat, pengorganisasian sistem nilai, perilaku dan fungsi sebagai satu kesatuan lingkungannya, serta dalam hal-hal yang bersifat wajib atau adalah wajib. bahwa seseorang melakukan sesuatu atau berperilaku dengan cara tertentu. Dalam hal ini pembentukan atau penanaman karakter merupakan pendidikan pada puncak pendidikan. Ciri-ciri tanggung jawab meliputi; (a) Tanggung jawab kepada Allah SWT, (b) Tanggung jawab terhadap diri sendiri, (c) Tanggung jawab terhadap tugas (Amanah), (d) Tanggung jawab terhadap keluarga, (e) Tanggung jawab terhadap masyarakat, (f) Tanggung jawab terhadap peraturan yang ada (Rusnaini, 2018).

Muhammad Mona Adha (2020, hlm. 97) menjelaskan bahwa pendidikan karakter dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan menggunakan keterampilannya, menggali dan memotivasi serta

mempersonalisasi nilai-nilai karakter peserta didik agar terwujud dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, pengenalan tanggung jawab kewarganegaraan sebagai warga negara dapat dilakukan di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter, juga dapat diajarkan lebih mendalam melalui pendidikan kewarganegaraan. Tanggung jawab sipil adalah menjadikan warga negara Indonesia yang beretika dalam kehidupan berbangsa.

Menurut Gottlieb & Robinson (2020, hlm. 144) *Civic responsibility* merupakan kegiatan dan sikap yang berkaitan dengan tanggung jawab sipil sebagai bentuk partisipasi sukarela. Tanggung jawab sipil berarti partisipasi aktif, terinformasi, terlibat dan konstruktif dalam kehidupan publik masyarakat, dengan fokus pada kesejahteraan umum. Menurut Wilcox (2020, hlm. 144) bahwa dalam mengembangkan tanggung jawab sipil dipandang sebagai bagian penting dari keberhasilan, yang mengarah pada hasil yang lebih baik.

Menurut Widagdho (1991, hlm. 144) pendapatnya diungkapkan sebagai berikut, "menjadi sadar akan tanggung jawab atas tindakan atau perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja." Ini berarti bahwa setiap perilaku atau tindakan seorang warga negara merupakan pilihan yang disengaja yang juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Selain itu, pandangan ini diperkuat lebih lanjut oleh pandangan Pam Schille dan Tamer Bryant (seperti yang dikutip dalam Hermawan 2013, hal. 13) tentang tanggung jawab, mendefinisikannya sebagai "perilaku yang membentuk respons kita dalam situasi sehari-hari, membimbing penilaian moral tertentu." Dari sudut pandang yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah respons yang dapat memengaruhi disposisi moral seseorang. Pada pemeriksaan lebih lanjut, moralitas yang disebutkan di sini berkaitan dengan pengakuan sadar dalam melaksanakan tugas dan hak-hak tanpa pengaruh eksternal.

Menurut Sulhan (2010, hlm. 5) mendefinisikan tanggung jawab sebagai berikut: Tanggung jawab adalah kombinasi dari perilaku bertanggung jawab. Segala sesuatu yang dilakukan dianggap sebagai konsekuensi.

Dengan kata lain, berpikirlah sebelum bertindak. Berani bertanggung jawab atas semua yang Anda lakukan. Selain itu, dapat memberikan contoh apa yang dilakukannya. Unggul merupakan gambaran perilaku yang berusaha melakukan yang terbaik, pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Perilaku pengendalian diri (self-control), mengacu pada perilaku disiplin diri dan mengatasi emosi. Jika diperhatikan pernyataan ini, terdapat kaitan yang sangat erat antara pikiran dengan perilaku manusia dalam bertindak. Jika seseorang sudah mempunyai tanggung jawab, maka ia pasti sudah melalui segala bentuk tindakan pada fase berpikir, yaitu. Semua risiko telah diperhitungkan. Keuntungan positif dari sikap bertanggung jawab tersebut adalah keinginan untuk berbuat yang terbaik, pemikiran yang patut diteladani dan kemampuan mengendalikan diri.

Pendidikan kewarganegaraan mencakup materi tentang tanggung jawab sipil. Tujuan dari program pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang cerdas dan bermoral (menjadi cerdas dan bermoral. citizen), sedangkan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, tanggung jawab merupakan sikap dan pengendalian diri yang dipertimbangkan secara matang sebelum bertindak. Menurut Aristoteles, Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 45) menyatakan bahwa "warga negara yang bertanggung jawab adalah sejajar dengan warga negara yang berbudi pekerti, dan warga negara yang berbudi pekerti adalah mereka yang memiliki keunggulan (kemuliaan) dan kebajikan moral.

Pernyataan ini menggaris bawahi pentingnya memiliki prinsip dan standar dalam proses berpikir dan tindakan warga negara yang teladan. Sebuah negara memerlukan warga negara cerdas untuk berkontribusi pada perkembangannya, dan oleh karena itu, atribut utama yang perlu ditanamkan pada warga negara adalah rasa akuntabilitas. Sejalan dengan perspektif yang telah disebutkan, Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 45) berpendapat bahwa "warga negara yang menunjukkan akuntabilitas (tanggung jawab kewarganegaraan) berusaha memenuhi kewajibannya secara maksimal dan memanfaatkannya sesuai aturan yang berlaku." Artinya, mengembangkan sikap bertanggung jawab memerlukan

kecerdasan sipil, karena warga negara yang baik mengikuti aturan yang ada dan menghindari tindakan yang tidak diinginkan. Peran aktif warga negara dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan negara memiliki arti yang sangat besar. Kualitas suatu negara tercermin dalam sejauh mana penduduknya dapat berpartisipasi dalam mengatasi tantangan dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Pandangan Cogan (sebagaimana dikutip dalam Djahiri, 2002, hlm. 92) menegaskan bahwa warga negara teladan seharusnya memiliki atribut sebagai berikut:

1. Rasa kepribadian atau identitas mandiri
2. Rasa untuk menggunakan beberapa hak, baik hak hukum, politik, sosial ekonomi, dan kemungkinan untuk menggunakannya secara baik dan benar
3. Rasa tanggung jawab terhadap tugas (kewajiban) yang menjadi pengikat.
4. Minat dan partisipasi dalam urusan publik (*public interest*)
5. Kemampuan menerima dan menganut nilai-nilai dasar masyarakat.

      Seperti yang disampaikan oleh Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm. 46), terdapat berbagai kewajiban kewarganegaraan, meliputi:

1. Kewajiban warga negara terhadap keluarga.
2. Kewajiban warga negara terhadap masyarakat.
3. Kewajiban warga negara terhadap lingkungan.
4. Kewajiban warga negara terhadap negara dan bangsa.
5. Kewajiban warga negara terhadap Tuhan.

      Pernyataan di atas menegaskan pernyataan sebelumnya bahwa warga negara yang baik harus memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab. Sebab warga negara harus mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara harmonis. Urgensi tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan hidup bermula dari kenyataan bahwa hampir seluruh bentuk aktivitas manusia bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup, sehingga diperlukan pemahaman dan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.



Menurut *Center for Civic Education* (CCE) (1994, hlm. 37) Karakter warga negara berupa Tanggung jawab warga negara (*citizen responsibility*) antara lain:

1. Patuhi peraturan hukum;
2. Akui dan hormati hak-hak individu lain;
3. Miliki kesadaran dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat;
4. Berperan dalam mengawasi pejabat terpilih dalam menjalankan tanggung jawab mereka;
5. Terlibat dalam dialog dengan wakil di lembaga pendidikan, pemerintahan lokal, dan pemerintahan nasional;
6. Memberikan suara dalam pemilihan umum;
7. Penuhi kewajiban perpajakan;
8. Bertindak sebagai saksi di pengadilan;
9. Menunjukkan kesiapan untuk ikut dalam wajib militer.

Kemudian, menurut Cahyono (2015, hlm. 118) Sikap tanggungjawab yang ditumbuhkan dalam Kriteria penilaian keterampilan untuk mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dalam kurikulum 2013 dijelaskan sebagai berikut:

1. Menunjukkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip agama yang dianut.
2. Menjaga ketepatan waktu dalam datang dan pulang dari sekolah.
3. Konsisten mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara.
4. Memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan.
5. Menunjukkan ketaatan dan penghormatan terhadap guru dan orang tua.
6. Terlibat dalam belajar yang efektif dan hadir di sekolah secara teratur.
7. Penyelesaian tugas-tugas sekolah yang tepat waktu.
8. Aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok.
9. Menunjukkan penghargaan terhadap pendapat yang beragam dan menghindari memaksakan kehendak pribadi pada orang lain.
10. Melaksanakan tugas-tugas dengan cermat, kreatif, dan tepat waktu.
11. Melaksanakan tugas, peran, dan fungsi dalam proyek kelompok.
12. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok.

13. Berkolaborasi secara efektif dengan anggota kelompok dan teman sekelas.
14. Menunjukkan antusiasme dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.
15. Berkoordinasi dengan anggota kelompok sebelum memulai pekerjaan.
16. Menghindari plagiarisme, kecurangan, atau menyalin dari tugas orang lain, baik dalam kelas yang sama maupun kelas yang berbeda.
17. Kesiapan untuk mengikuti instruksi.
18. Memiliki rasa toleransi terhadap sesama siswa.
19. Konsisten mencantumkan sumber informasi dalam penyelesaian tugas.
20. Mampu menyajikan hasil tugas secara efektif kepada guru dan teman sekelas.

Dari hasil paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Civic responsibility* merupakan kegiatan dan sikap yang berkaitan dengan tanggung jawab sipil sebagai bentuk partisipasi sukarela dan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara yang bertanggung jawab. Tanggung jawab sipil dapat diartikan sebagai partisipasi aktif, informatif, terlibat dan konstruktif dalam kehidupan publik masyarakat, dengan fokus pada kebaikan bersama.

#### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu, yang hasil dari penelitian tersebut menjadi salah satu acuan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti dan juga menjadi sumber ilmu dan sumber informasi sehingga memberikan pemahaman kepada peneliti.

Adapun judul penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul penulis antara lain:

1. Zainuddin (2014). Jurnal berjudul " Implementasi Andragogi Di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-hikam Malang" Hasil dari penelitian ini adalah Terkait dengan perencanaan andragogi, Pondok Pesantren al-Hikam Malang memiliki beberapa itikad baik melalui perencanaan andragogi

yang diselenggarakan agar Proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan preferensi para siswa, meliputi: a) menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif; b) perencanaan yang memprioritaskan keterlibatan aktif siswa; c) Melibatkan siswa dalam proses perencanaan. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Hikam Malang menerapkan lima metode andragogi yang berasal dari prinsip pendidikan orang dewasa: diskusi, simulasi, brainstorming, dan metode individual. Selain itu, dalam hal penilaian andragogi, evaluasi dilakukan secara individu dan kolektif. Prinsip-prinsip andragogi mencakup komitmen terhadap iman, pengejaran pengetahuan, dan kesiapan untuk aplikasi dunia nyata. Terakhir, model-model andragogi terdiri dari model Muhadhoroh, Ansos, dan Ambak.

2. Mochamad Arif Fanan, dkk. (2017). Dalam sebuah jurnal berjudul "Dampak Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi Pengelolaan Pondok Pesantren Al Jauhar Summersari Jember," hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi linear berganda mengungkapkan korelasi positif antara budaya organisasi dan gaya kepemimpinan dengan komitmen organisasi para pengelola di Pondok Pesantren Al Jauhar Summersari Jember. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan "pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi pengelolaan Pondok Pesantren Al Jauhar Summersari Jember" terbukti benar. Terkait Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Komitmen Organisasi, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi memiliki hubungan positif dengan komitmen organisasi para pengelola di Pondok Pesantren Al Jauhar. Hasil pengujian hipotesis parsial mengonfirmasi dampak budaya organisasi terhadap komitmen organisasi, dengan skor t yang dihitung sebesar 4,600 melebihi nilai t-tabel kritis sebesar 2,032, dan signifikansi sebesar 0,000 di bawah 0,05. Akibatnya, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak demi hipotesis alternatif ( $H_a$ ), menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi, sebagian, memiliki pengaruh positif dan substansial terhadap

komitmen organisasi di Pondok Pesantren Al Jauhar Summersari Jember. Nilai positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai budaya organisasi di dalam pesantren, semakin meningkat pula komitmen organisasi di kalangan pengelola Pondok Pesantren Al Jauhar Summersari Jember. Lebih lanjut, dalam hal Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan sesuai dengan orientasi positif terhadap komitmen dewan. Namun, hasil pengujian hipotesis parsial mengungkap bahwa efek gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi memiliki skor t sebesar 1,390, lebih rendah dari nilai t-tabel kritis sebesar 2,032, dan signifikansi sebesar 0,173, lebih tinggi dari 0,05. Akibatnya, hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima, dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak. Ini mengindikasikan bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi para pengelola di Pondok Pesantren Al Jauhar.

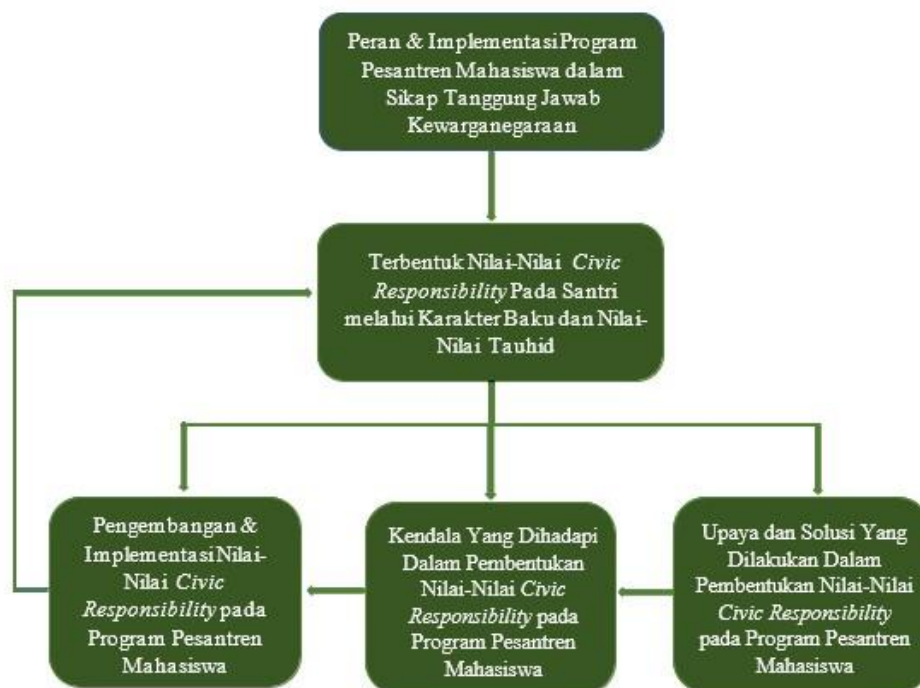
3. Sutoyo, dkk. (2015). Studi yang berjudul "Penciptaan Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter dan Implikasinya terhadap Peningkatan Tanggung Jawab Kewarganegaraan di Universitas Slamet Riyadi, Surakarta" mengungkapkan bahwa merancang model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi melibatkan sekelompok mata kuliah yang saling terhubung. Pengembangan Kepribadian (MPK) melalui Civic Project dapat mewujudkan misi, visi dan tujuan pendidikan nasional. Mendorong pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang jurusan dan bahan ajarnya mendukung dan penting bagi pengembangan karakter bangsa yang mendukung masyarakat demokratis yang beradab, sehingga mahasiswa tumbuh menjadi peneliti atau profesional yang menjadi bagian dari tanggung jawab sipil yang semakin meningkat.
4. Cahyono, dkk. (2015). Hasil dari studi analisis deskriptif yang berjudul "Dampak Penilaian Profisiensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 terhadap Kemajuan Tanggung Jawab Kewarganegaraan di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri (SMK Negeri) di Bandung" mengindikasikan bahwa, secara keseluruhan, variabel Y (tanggung jawab warga terhadap siswa) tergolong cukup dan mempunyai mean sebesar 3,14. Untuk variabel X1 (penilaian keterampilan perencanaan PPKn) tergolong cukup dan mempunyai mean sebesar 3,17. Sedangkan pada variabel X2 (penerapan penilaian keterampilan PPKn) tergolong cukup dengan rata-rata sebesar 3,40. Kemudian pada Kurikulum 2013, desain guru dalam evaluasi pendidikan kewarganegaraan mempunyai pengaruh signifikan sebesar 0,136 terhadap peningkatan tanggung jawab kewarganegaraan pada siswa SMK Negeri se-Kota Bandung. Selain itu, diperkenalkannya penilaian keterampilan mata pelajaran PPKn dalam kurikulum (2013) telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan tanggung jawab kewarganegaraan siswa SMK Negeri Se-Kota Bandung 0,137. Artinya, semakin sering guru melakukan penilaian kompetensi melalui perencanaan yang matang dan prosedur yang benar, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan tanggung jawab kewarganegaraan siswa.

5. Nurul Febrianti, dkk. (2016). Dalam Penelitian yang berjudul "Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi Terhadap *Civic Responsibility* Pada Mahasiswa". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bahan ajar pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap tanggung jawab kewarganegaraan peserta didik. Jika dilihat dari kriteria penafsiran nilai korelasinya, maka pengaruh bahan ajar pendidikan kewarganegaraan terhadap tanggung jawab kewarganegaraan peserta didik sebagai pendidikan demokrasi termasuk dalam kategori baik. Hal ini terjadi karena dosen berhasil menyampaikan materi kewarganegaraan dengan sangat baik. Namun berdasarkan hasil penelitian berdasarkan wawancara diketahui bahwa siswa masih belum memahami materi pendidikan kewarganegaraan secara luas atau mengalami kesulitan dalam memahaminya.

## E. Kerangka Pemikiran

Menurut Arif (2017, hlm. 4) Suatu kerangka pemikiran mengacu pada gambaran (narasi) atau pernyataan (proposisi) mengenai struktur kognitif yang memandu pendekatan dalam pemecahan masalah yang telah diakui atau dirumuskan. Dalam penelitian kualitatif, kerangka kognitif ini, atau kerangka berpikir, memainkan peran penting dalam menentukan keseluruhan ketepatan proses penelitian. Selain itu, paparan dalam penelitian harus mampu menjelaskan dengan cermat dan mengesahkan dengan tegas asal-usul permasalahan yang sedang dibahas.



Sumber: Disusun oleh Peneliti

Bagan 2.1 kerangka pemikiran